BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah sendiri telah menetapkan target - target yang direncanakan kedepannya, salah satunya perkembangan sosial dan kesejahteraan semua orang dan daerah, dengan cara membangun sarana prasarana publik yang merata di Indonesia. Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana publik yang selama ini dikeluarkan adalah berasal dari sektor pajak. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus (Ekawati, 2008). Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi dari regulasi yang berlaku ini tampak tidak adanya jaminan manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadajaminan ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Satriyo, 2009). Pemerintah perlu segera mengimplementasikan reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan yang terjadi di Indonesia terutama di kalangan dunia usaha, di dalam maupun di luar negeri (Satriyo, 2009).

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, dengan perombakan sistem perpajakan paling mendasar, yaitu

digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang menghitung sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya (Harahap, 2004). Dalam pelakasanaan sistem tersebut juga, wajib pajak di tuntut keaktifannya dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia menggunakan perubahan secara bertahap sehingga bukan kejutan besar yang terjadi, melainkan berbagai masalah yang timbul dalam proses adaptasinya. Masalah yang timbul dalam administrasi pajak adalah wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan dan membingungkan seperti mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi. Apabila masalah yang seperti ini tidak ditindak lanjuti, maka akan berakibat pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Mengingat jumlah subjek pajak dan objek pajak yang begitu besar, maka pemerintah mencoba untuk berupaya dalam memperbaiki administrasi perpajakan melalui reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang saat ini dilaksanakan oleh Dirjen Pajak.

Modernisasi sistem perpajakan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang tepat merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem pelaporan perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program

transparansi, dimana dapat mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan fungsi pajak. Aplikasi seperti e-*billing,* e-faktur, e-SPT PPN dan semua sistem perpajakan yang berbasis elektronik merupakan bagian dari proses modernisasi perpajakan, dengan maksud agar wajib pajak memperoleh manfaat serta kemudahan dalam penerapannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Berly Angkoso (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Reformasi yang dilakukan diantaranya adalah penyederhanaan prosedur untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak dan Pelaporan Pajak. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriliana dan Triwigati (2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem admisitrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Di lain pihak, masyarakat sebagai pelaku usaha yang sebagian besar menjalankan usahanya di sektor Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM), terus berupaya meningkatkan penghasilan dan laba usahanya tanpa mengerti beban pajak yang akan muncul. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Syarif (Kajian Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2014), yang menilai UMKM sebagai salah satu sektor yang sering kali luput dari pajak. Menurut Ramadhana (2015) saat ini UMKM berperan besar dalam perekonomian di Indonesia. Dari data statistik, dikatakan bahwa 99% dari lebih kurang 20 juta wajib pajak terdaftar adalah UMKM. Namun demikian, porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Ramadhana (2015), saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Dalam hal ini disebutkan sektor UMKM menjadi salah satu pihak yang enggan untuk membayar pajak mereka. Padahal sektor UMKM ini merupakan Wajib Pajak yang dianggap cukup potensial. Pengembangan UMKM di Indonesia ini terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Saat ini pertumbuhan UMKM mencapai 55,2 juta pelaku usaha.

Melihat permasalahan yang ada, perlunya dilakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM saat dilakukannya reformasi perpajakan dan di terapkannya modernisasi administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan ditelusuri seberapa besar pengaruhnya terhadap penerapan

modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh Dirjen Pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga adalah terletak pada tempat penelitiannya, penelitian ini dilakukan di kota Palembang dengan menggunakan sampel wajib pajak UMKM kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan proposal penelitian ini dengan judul **"Analisis Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".** Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Palembang pada beberapa UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran diatas penulis merumuskan suatu masalah, adapun masalah yang diangkat:

Apakah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dilakukannya penelitian ini:

Untuk memperoleh bukti empiris tentang penerapan modernisasi administras perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Dapat memberikan pengetahuan dan ilmu perpajakan, khususnya tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi dunia pendidikan

   penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruhpenerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis maupun penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu beserta landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup penelitian terdiri dari simpulan penelitian, keterbatasan, dan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.